

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kemudian dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

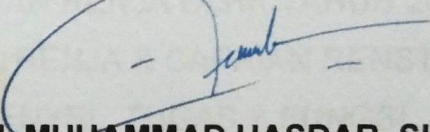
Penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Amin !

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 20 Maret 2022

KEPALA DLH,



H. MUHAMMAD HASDAR, SKM, M.Kes.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19620906 198302 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLHK TAHUN 2020	6
2.1. EVALUASI PELAKS. RENJA & CAPAIAN RENSTRA	6
2.2. ISU-ISU PENTING PENYEL. TUGAS & FUNGSI.....	24
2.3. PENELAAHAN USULAN PROG. & KEG. MASY.....	26
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN.....	30
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	30
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH.....	30
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	31
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH	41
BAB V : PENUTUP	45
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan tentang pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut harus dapat diimplementasikan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, setiap proses penyelenggaraan pemerintahan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma sosial. Hasil pemerintahan yang baik, terukur melalui indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Menyadari arti pentingnya pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, harus mampu menjabarkan RPJMD ke dalam Renstra SKPD yang merupakan program kerja jangka menengah (lima tahunan) dengan muatan program yang lebih jeneral serta tujuan yang lebih kompleks.

Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen rencana pembangunan berdimensi satu tahun, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai

upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan publik yang sudah dicapai sesuai dengan tupoksi. Rencana Kerja (Renja) ditetapkan untuk menjadi dasar penyusunan RKA-DLH Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Kerja (Renja) menggambarkan berbagai indikator yang diklasifikasikan sehingga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja merupakan program kinerja jangka pendek dengan muatan program yang sifatnya lebih spesifik dengan tujuan yang lebih konkrit dan terukur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menjadi komitmen bersama bagi pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, memuat uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DLH TAHUN 2021, memuat evaluasi pelaksanaan renja DLH Tahun 2021 dan capaian Renstra DLH, analisis kinerja pelayanan DLH, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja DLH, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, memuat rencana program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta besaran pendanaannya.

BAB V : PENUTUP, memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DLH TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA DLH

Evaluasi kinerja merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja kegiatan, dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian kinerja renstra didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renstra dan digunakan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Hal ini penting dalam menyikapi kinerja organisasi ke depan, sehingga keberhasilan yang diraih dapat ditingkatkan dan kegagalan yang terjadi mendapat solusi yang tepat.

Secara garis besar, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 :
Capaian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran					Persentase Capaian (%)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	50,50	50,00	99,01	Baik
		Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu	88,80	87,16	98,15	Baik
		Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Penghitungan indeks kualitas tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi	89,12	37,29	41,84	Sangat Kurang

Sedangkan Evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel indikator kinerja di bawah ini :

Tabel 2.2 :
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	50,50	50,00	99,01	52,00	96,15
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,80	87,16	98,15	85,39	102,07
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	89,12	37,29	41,84	42,57	87,60
Rata-rata Capaian Kinerja					79,66		95,27

Indikator (1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Kinerja nyata dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2021 adalah sebesar 50,00. Sehingga persentase capaian kinerjanya 99,01% jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	50,50	50,00	99,01	52,00	96,15

Realisasi kinerja tahun ini menunjukkan angka yang tetap yaitu 50,50 tetapi terjadi peningkatan kinerja sebesar 17,18 % jika dibandingkan

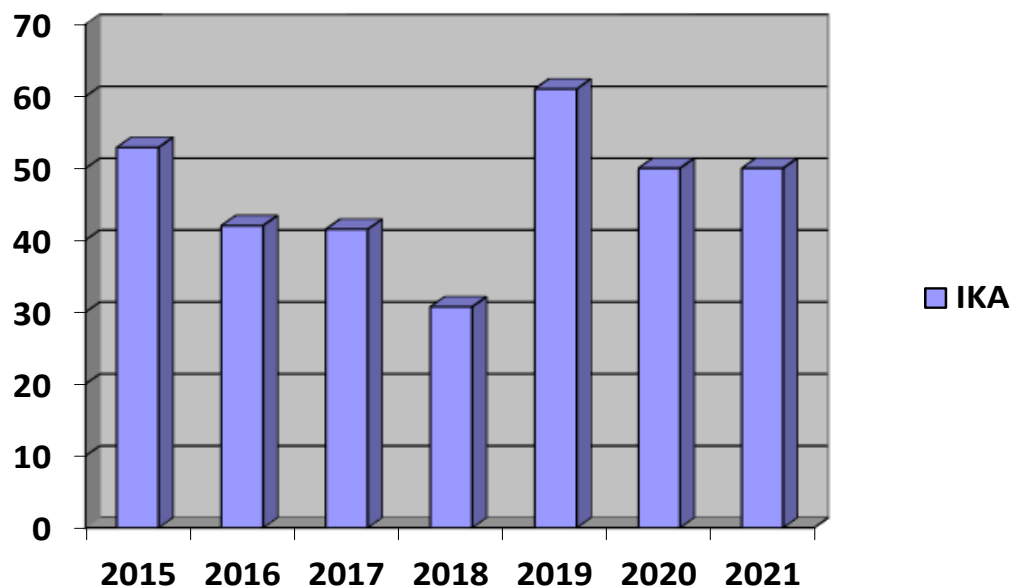
dengan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun ini, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 maka tingkat capaian kinerjanya sebesar 83,33 %. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, limbah B3 serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan.

Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2016 s/d Tahun 2021, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3 :
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air
Tahun 2016 s/d Tahun 2021

No	Tahun Renstra	IKA		%
		Target	Realisasi	
1	2016	52,9	42,01	79,41
2	2017	53	41,50	78,30
3	2018	54	30,71	56,87
4	2019	55	61,04	110,98
5	2020	61,10	50,00	81,83
6	2021	50,50	50,00	99,01

Perkembangan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Indikator (2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2021 adalah sebesar 88,80. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,46 % jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,80	87,16	98,15	85,39	102,07

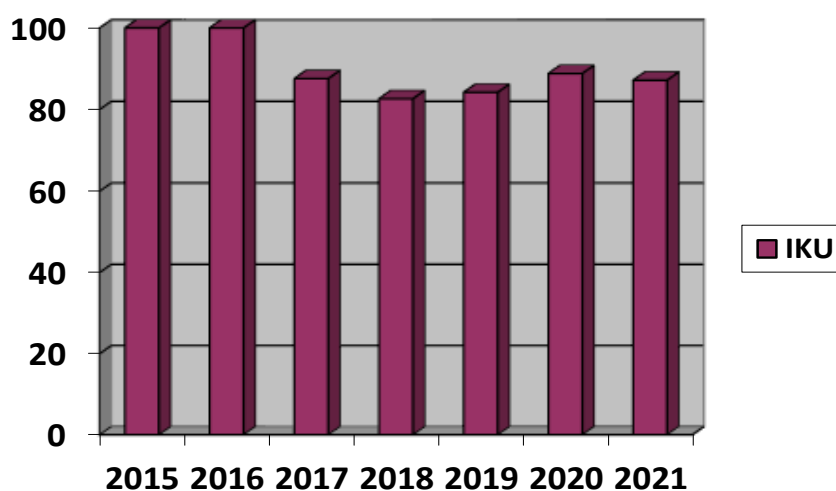
Realisasi kinerja Tahun ini menurun 1 Point, sehingga terjadi penurunan kinerja sebesar 6,34 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan Nilai Indeks Kualitas Udara tahun ini, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, maka capaian kinerjanya

mencapai 101,60 %. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan strategi pengelolaan persampahan, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat untuk mempertahankan kualitas udara. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2016 s/d Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 :
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara
Tahun 2016 s/d Tahun 2021

No	Tahun Renstra	IKU		%
		Target	Realisasi	
1	2016	99,98	99,97	99,99
2	2017	99,98	87,55	87,57
3	2018	99,98	82,62	82,64
4	2019	99,98	84,19	84,20
5	2020	84,20	88,80	105,46
6	2021	88,80	87,16	98,15

Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Indikator (1.2) Indeks kualitas udara

Capaian kinerja nyata indikator Indeks kualitas Udara pada tahun 2021 adalah sebesar 87,16. Bila dibandingkan dengan target kinerja yang

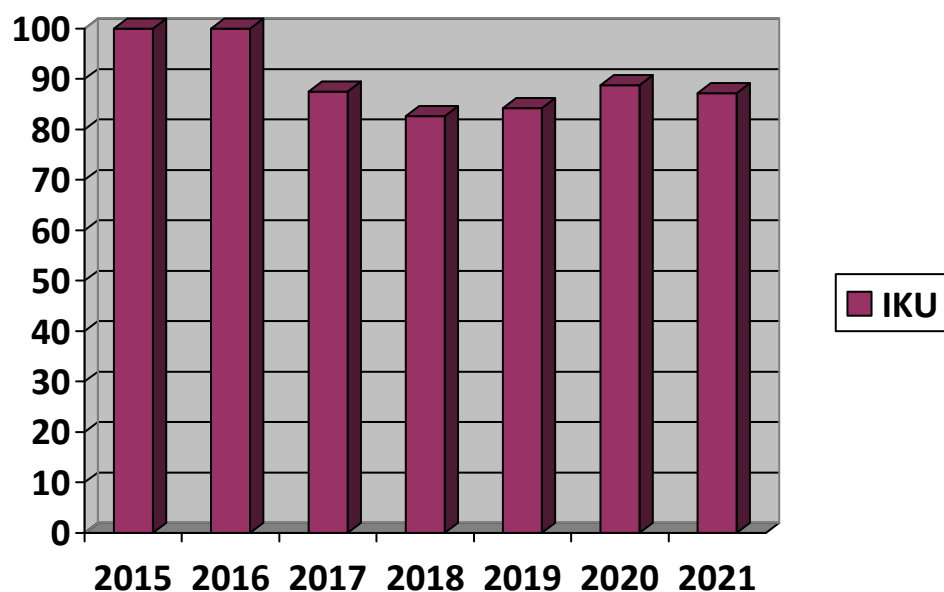
direncanakan sebesar 88,80, maka persentase capaian kinerjanya adalah 98,15 %. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2016 s/d Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 :
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara

No	Tahun Renstra	IKU		%
		Target	Realisasi	
1	2016	99,98	99,97	99,99
2	2017	99,98	87,55	87,57
3	2018	99,98	82,62	82,64
4	2019	99,98	82,62	82,64
5	2020	84,20	88,80	105,46
6	2021	88,80	87,16	98,15

Perkembangan Indeks Kualitas Udara Tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Indikator (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2021 adalah sebesar 37,29. Sehingga persentase capaian

kinerjanya 41,84 % jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini tidak memenuhi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

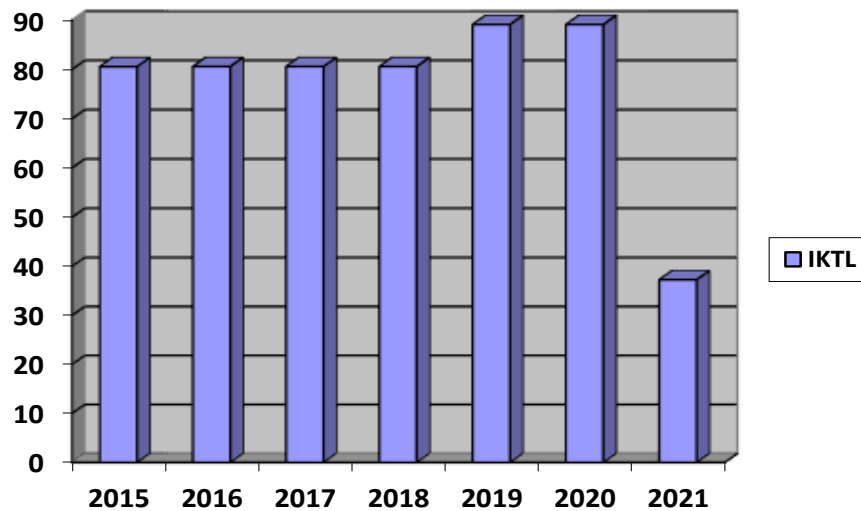
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	89,12	37,29	41,84	42,57	87,60

Realisasi kinerja tahun ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, ini disebabkan oleh perbedaan data yang digunakan dalam penghitungan IKTL. Selama ini data base luas tutupan lahan yang digunakan sebagai dasar penentuan target masih merupakan data Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018 bukan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbaru sehingga hasil yang diperoleh berbeda. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun ini, jika dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 mencapai kinerja sebesar 52,56 %. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2016 s/d Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 :
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Tahun 2016 s/d Tahun 2021

No	Tahun Renstra	IKTL		%
		Target	Realisasi	
1	2016	70,54	80,59	114,25
2	2017	70,60	80,59	114,15
3	2018	70,67	80,59	114,04
4	2019	70,74	89,12	125,98
5	2020	89,12	89,12*	100,00
6	2021	89,12	37,29	41,84

Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



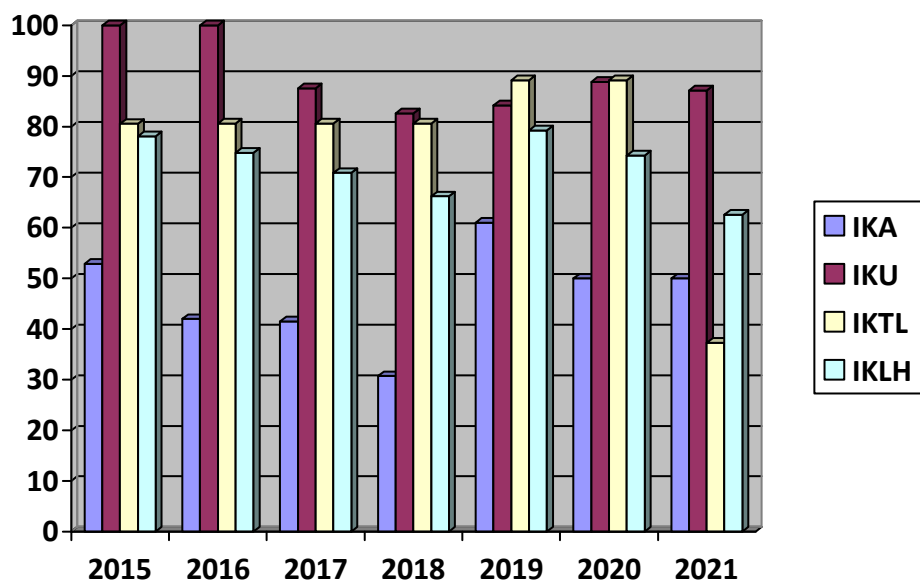
IKLH pada Tahun 2021 ini didukung oleh Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 50,00, Indeks Kualitas Udara (IKU) 87,16, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 37,29. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 :
Data perbandingan IKA, IKU, IKTL, IKLH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Tahun 2015 s/d Tahun 2021

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2015	52,90	99,98	80,56	78,08
2016	42,01	99,97	80,59	74,83
2017	41,50	87,55	80,59	70,86
2018	30,71	82,62	80,59	66,23
2019	61,04	84,19	89,12	79,21
2020	50,00	88,80	89,12*	74,28
2021	50,00	87,16	37,29	62,27

Sumber : DLH Tahun 2021

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 s/d 2021, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Bank Sampah yang dikelola secara aktif;
2. Adanya program pemerintah dalam mewujudkan Kota Sehat/ Adipura
3. Adanya kebijakan pemerintah daerah berupa Peraturan Bupati tentang JAKSTARADA dan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah;
2. Tidak adanya keseimbangan antara penanaman pohon dengan sumber kadar karbon monoksida (CO);
3. Banyaknya pemakaian pupuk pestisida dalam sektor pertanian;
4. Kurang memadainya sarana dan prasana persampahan, baik kualitas maupun kuantitas..

Untuk lebih jelasnya, Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan pencapaian kinerja akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 sesuai Format terlampir pada Juknis.

Tabel 2.8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra DLH s/d Tahun 2021
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d Tahun 2021	
								Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11			Urusan Lingkungan Hidup									
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (%)	12,50	37,50	12,50	37,50	300	12,50	87,50	700%
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Rencana PPLH terevaluasi	50,00	50,00	50,00	50,00	100	12,50	112,50	900%

				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH yang terlaksana	15,40	0	15,40	15,54	100,9	20	35,50	0
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	7,16	2,59	7,16	2,75	38,40	2,59	7,90	305,01
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian yang Memenuhi Baku Mutu	14,29	7,14	14,29	0	0	10	17,10	171
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0,02	0,00	0,02	0,037	185	25	25,03	100
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0,02	0,002	0,02	0,037	185	0,047	0,08	170

				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	1,37	1,38	1,37	0,005	0,3	1,38	2,76	200
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1.884,97 Ha	2,30	1.858,51 Ha	1.884,97 Ha	101,40	2,31	106,61	46,15
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Lembaga/Perusaha an penghasil Limbah B3 yang Diawasi (%)	0,02	100	0,02	0,018	90	9,25	109,26	109
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang disimpan sementara	5.220 m ³	0	5.220 m ³	9.245,65 m ³	177,10	9,25	9,25	100
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	40	63,64	40	4,35	10,80	64	131,99	206

				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Pejabat Pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda	8,06	6,36	8,06	25	310,1	3,33	34,69	26,08
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal yang terkait PPLH, yang diakui keberadaannya (%)	1,14	N/A	1,14	17,05	1495,6	2,27	19,30	16,90
				Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional terkait PPLH yang diakui	1 buah	N/A	1 buah	15 buah	1500	11,36	26,36	232
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Mitra yang Berkinerja dalam Pengelolaan Lingkungan	0	N/A	20	0	0	23,08	43,08	186,65

				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra LH yang berprestasi	0	0,00	5 Buah	0	0	100	100	100
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat / Garing Dunia Usaha / Garing Dunia Pendidikan yang Berprestasi (%)	21,74	20	21,74	20	91,90	33,33	73,33	220
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	1 Buah	22,73	1 Buah	3 Buah	300	15	337,73	22,51
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan (%)	100	80	100	100	100	100	280	280

				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	100	80	2 Kasus	7 Kasus	350	100	100	100
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	22,22	1,30	22,22	19,75	88,80	1,30	22,35	17,19
				Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	9.333 Ton	14,22	9.333 Ton	8.103,01 Ton	86,80	14,23	114,45	8,04

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHK
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kualitas air (IKA)	-	-	54	55	56	56	42,01	41,50	30,71	61,04	50,00	61,15	
2	Indeks kualitas udara (IKU)	-	-	99,98	99,98	99,98	99,98	99,97	87,55	82,62	84,19	88,80	84,98	
3	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	-	-	70,67	70,74	70,82	70,82	80,59	80,59	80,59	89,12	89,12	89,12	
4	Indeks pencemaran status mutu air	-	-	-	-	-	-	5,75	5,85	6,93	7,16	2,59	2,59	
5.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	-	n.a	-	-	-	-	100	100	100	42,86	63,64	64,00	
6.	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan	-	n,a	-	-	-	-	100	100	100	100	80,00	100,00	
7.	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	-	n.a	-	-	-	-	0,05	9,60	14,63	14,33	14,22	14,23	

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Hal dimaksud dapat dilihat dalam beberapa regulasi antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten Selayar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Disamping itu, Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai RPJMD 2021-2026 adalah ***“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”***. Salah satu Misi sebagai langkah kongkrit untuk mewujudkan Visi tersebut yaitu ***“Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup”***. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah.

Kegiatan lingkungan yang telah diselenggarakan selama ini lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan

peningkatan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan serta pengelolaan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup kedepan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang teraihnya predikat Kabupaten Adipura melalui program perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), pengendalian limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan/izin PPLH, pengakuan keberadaan MHA/kearifan lokal yang terkait dengan PPLH, peningkatan pendidikan/pelatihan/penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, penanganan pengaduan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan.

Adapun hambatan internal yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, masih lemahnya system informasi yang memuat data base lingkungan serta sarana prasarana pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup yang belum memadai. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup serta kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih minim terhadap lingkungan.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup. Peluang-peluang dimaksud, antara lain :

1. Adanya kebijakan dari Bupati/Wakil Bupati terpilih yang menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu kegiatan yang harus disukseskan.
2. Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional oleh aparat lingkungan hidup yang dilaksanakan BLHD Provinsi, PPE Sumapapua dan Kementerian Lingkungan Hidup yang berkesinambungan;
3. Serta regulasi bidang lingkungan hidup yang jelas.

2.3. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan diperoleh melalui penelitian dan pengamatan lapangan, kunjungan kerja Kepala Daerah, pelaksanaan musrenbang kecamatan/kabupaten serta melalui proses pembahasan Komisi DPRD sebagai wakil rakyat.

Untuk lebih jelasnya, Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.10 sesuai Format terlampir pada Juknis.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volum e	Cat.
I	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Desa Harapan Kec. Bontosikuyu	Jumlah Operasional dan Maintenanc e Onlimo	1 Paket	
II	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)				
A	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Desa Batang Kec. Takabonerate, Desa Pamatata Kec.	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	1 Ha	

		Bontomatene	yang dikelola		
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Desa Bontolempangan, Kel. Benteng	Luas Taman Kehati Lainnya yang dikelola	0,2 Ha	
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kel. Benteng Utara, Desa Bontotangnga, Desa Labuang Pamajang	Jumlah mesin pemotong rumput	3 Buah	
		Kel. Benteng	Jumlah Lampu Taman Pelangi dan Taman Pusaka	50 Unit	
		Kel.Benteng Kecamatan Benteng	Jumlah Pot Bunga di Jalur Jalan dan Trotoar	50 Buah	
III	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
A	Pengelolaan Sampah				
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Ko	Desa Kaburu Kec. Bontomanai	Jumlah Pusat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu	1 Unit	
		Desa Batang Kec. Takabonerate, Kel. Benteng Utara	Jumlah Bank Sampah	2 Unit	
		Kel. Benteng Kec. Benteng, Kel.Batangmata Sapo Kec.Bontomatene, Desa Kembang Ragi	Jumlah Motor Sampah Roda Tiga	6 Unit	

		Kec.Pasimasunggu			
		Kel. Benteng Utara	Jumlah Rumah Kompos	11 Unit	
		Desa Kaburu Kec. Bontomanai	Jumlah Alat Pelindung Diri Petugas TPA/TPST	110 Buah	
		Kec. Benteng	Jumlah Keranjang Takakura	50 Buah	
		Desa Kaburu Kec. Bontomanai	Jumlah Jembatan Timbang	1 Paket	
		Desa Kaburu Kec.Bontomanai	Jumlah Timbangan Gantung	3 Buah	
		Desa Kaburu Kec. Bontomanai	Jumlah Mesin Penghancur Kresek	1 Unit	
		Kec. Benteng	Jumlah Tempat Sampah RT Terpilah	500 Buah	
		Kec.Benteng	Jumlah Kontainer	1 Unit	
		Kec. Benteng	Jumlah Damp Truck	1 Unit	
		Kecamatan Kepulauan	Jumlah Perahu Sampah	1 Unit	
		Kepulauan Selayar	Jumlah mesin penghancur	11 Unit	

			plastik		
		Kec. Benteng	Jumlah Arm Roll	1 Unit	
		Kel. Benteng Kel. Benteng Utara	Jumlah Tempat Sampah	150 Buah	
		Desa Kaburu Kec. Bontomanai	Jumlah Bangunan Pendukung TPA	1 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DLH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan yang ideal harus mempunyai prinsip partisipatif karena masyarakat yang akan memperoleh manfaatnya maka masyarakat juga harus turut serta dalam prosesnya melalui penyelenggaraan musrenbang RPJMD. Sehingga fungsi perencanaan sebagai alat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dapat tercapai.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut meliputi rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran dalam tahun 2023.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gambaran tentang realitas masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5

tahun ke depan. Visi tersebut disusun dengan memperhatikan visi misi Bupati/Wakil Bupati dan arah pembangunan daerah jangka menengah serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Adapun sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta pencapaian sasaran SKPD, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, mempunyai 11 (sebelas) program dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 103 (seratus tiga) sub kegiatan.

Untuk lebih jelasnya, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai Lampiran (sesuai Format terlampir pada Juknis).

Tabel 3.1 :
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar								
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja		70,25	7.930.467.250	DAU		70,53	8.128.966.453
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan		85,00				88,00	
2	11	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	Benteng	100	107.000.000	DAU		100	122.000.000

						Kinerja yang tersusun							
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH/ Benteng	3 Dokumen	45.000.000	DAU		3 Dokumen	48.000.000
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH/ Benteng	1 Dokumen	6.000.000	DAU		1 Dokumen	7.000.000
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH/ Benteng	1 Dokumen	3.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DLH/ Benteng	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	7.000.000
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DLH/ Benteng	1 Dokumen	3.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000

2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH/ Benteng	4 Laporan	12.000.000	DAU		4 Laporan	15.000.000
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH/ Benteng	13 laporan	33.000.000	DAU		13 Dok	156.000.000
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun		100	3.434.202.067			100	3.438.000.000
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DLH/ Benteng	39 Orang/ Bulan	3.348.202.067	DAU		39 Orang	3.350.000.000
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH/ Benteng	1 Laporan	8.000.000	DAU		1 Laporan	8.000.000
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	DLH/ Benteng	12 Laporan	64.000.000	DAU		12 Laporan	65.000.000

					Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD							
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DLH/ Benteng	12 Dokumen	14.000.000	DAU		12 Laporan	15.000.000
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD DLH yang tersusun	DLH/ Benteng	100	48.000.000			100	55.000.000
2	11	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLH/ Benteng	4 Laporan	28.000.000	DAU		4 Laporan	30.000.000
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLH/ Benteng	4 Laporan	20.000.000	DAU		4 Laporan	25.000.000
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat daerah	Persentase Laporan Administrasi Pendapatan DLH yang tersusun		85,71	208.500.000			85,71	215.000.000
2	11	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	DLH/ Benteng	1 Dokumen	2.000.000			1 Dokumen	4.000.000

						Retribusi Daerah							
2	11	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	DLH/ Benteng	1 Dokumen	200.500.000	DAU		1 Dokumen	201.000.000
2	11	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DLH/ Benteng	1 Dokumen	6.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	11	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian DLH yang tersusun		100	71.000.000			100	98.000.000
2	11	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DLH/ Benteng	4 Dokumen	24.000.000	DAU		4 Dokumen	28.000.000
2	11	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	DLH/ Benteng	2 Dokumen	26.000.000	DAU		2 Dokumen	30.000.000
2	11	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DLH/ Benteng	2 Dokumen	11.000.000	DAU		2 Dokumen	15.000.000

2	11	01	2.05	09	Pendidikan, Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DLH/ Benteng	5 Orang	10.000.000	DAU		5 Orang	25.000.000
2	11	01	2.06		Administrasai umum perangkat daerah	Presentase Administrasi Umum yang tersedia		100	199.000.000			100	212.000.000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DLH/ Benteng	1 Paket	9.000.000	DAU		1 Paket	10.000.000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DLH/ Benteng	1 Paket	8.000.000	DAU		1 Paket	8.000.000
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	DLH/ Benteng	3 Dokumen	6.000.000	DAU		3 Dokumen	8.000.000
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH/ Benteng	1 Laporan	25.000.000	DAU		1 Laporan	26.000.000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH/ Benteng	136 Laporan	151.000.000	DAU		136 Laporan	160.000.000

2	11	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan LH		33,33	71.000.000			38,46	125.000.000
2	11	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DLH/ Benteng	1 Unit	30.000.000	DAU		3 Unit	65.000.000
						Jumlah Mobil Jabatan	DLH/ Benteng						
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DLH/ Benteng	60 Unit	23.000.000	DAU		60 Unit	30.000.000
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DLH/ Benteng	2 Unit	18.000.000	DAU		3 Unit	30.000.000
2	11	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan jasa penunjang DLH		100	2.877.765.183			100	2.883.764.800
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH/ Benteng	1 Laporan	27.000.000	DAU		1 Laporan	30.000.000
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DLH/ Benteng	3 Laporan	67.000.383	DAU		3 Laporan	70.000.000

2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DLH/ Selayar	1 Laporan	2.783.764.800	DAU		1 Laporan	2.783.764.800
2	11	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase DLH BMD yang terpelihara		16,31%	2.196.000.000	DAU		16,31%	2.263.240.000
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DLH/ Benteng	14 Unit	50.000.000	DAU		14 Unit	57.000.000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DLH/ Benteng	40 Unit	765.000.000	DAU		40 Unit	770.000.000
2	11	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	DLH/ Benteng	2 Unit	46.000.000	DAU		2 Unit	55.000.000

2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DLH/ Selayar	10 Unit	21.000.000	DAU		10 Unit	63.201.653
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DLH/ Benteng	5 Unit	32.000.000	DAU		5 Unit	35.000.000
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kab		12,50	354.791.500			12,50	363.671.931
2	11	02	2.01		Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota	Persentase Rekomendasi Rencana PPLH terevaluasi		12,5	284.491.580			25,00	291.671.931
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	Masyarakat/Se layar	3 Dokumen	284.491.580	DAU		3 Dokumen	291.671.931
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	Persentase Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH yang terlaksana		20	70.299.920			28	72.000.000

2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Selayar	1 Dokumen	70.299.920	DAU		1 Dokumen	72.000.000
2	11	03			Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air		2,59	2.007.106.200			2,59	2.057.344.068
2	11	03	2.01		Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu		10	1.152.106.200			10	1.155.000.000
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Masyarakat/Se layar	2 Dokumen	152.106.200	DAU		2 Dokumen	155.000.000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Masyarakat/Se layar	1 Dokumen	1.000.000.000	DAK/ DAU		1 Dokumen	1.000.000.000

						dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan							
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH		25	200.000.000			25	216.344.068
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Masyarakat/Se layar	2 Laporan	200.000.000	DAU		2 Laporan	216.344.068
2	11	03	2.03		Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH		0,047	655.000.000			0,047	686.000.000
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kec. Benteng, kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene, Kec. Bontoharu	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	130.000.000

2	11	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene, Kec. Bontoharu	1 Dokumen	305.000.000	DAU		1 Dokumen	306.000.000
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kec. Benteng, kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene, Kec. Bontoharu	1 Dokumen	250.000.000	DAU		1 Dokumen	250.000.000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		1,38	1.784.094.400			1,38	1.828.750.283
2	11	04	2.01		Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Persentase Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola		2,31	1.784.094.400			2,31	1.828.750.283
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Benteng	3 Ha	59.594.400	DAU		3 Ha	74.750.283

2	11	04	2.01	03	Pengelolaan kebun raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Dusun Gojang, Desa Bontomasranu Kec. Bontomanai	5 Ha	497.000.000	DAU		5 Ha	500.000.000
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Benteng, kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene, Kec. Bontoharu	20 Ha	1.027.500.000	DAU		20 Ha	1.029.000.000
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Selayar	0,42 Ha	100.000.000	DAU		0,42 Ha	115.000.000
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kec. Benteng	5 Unit	100.000.000	DAU		5 Unit	110.000.000
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikendalikan		100,00	111.505.900			100,00	114.296.893

2	11	05	2.01		Penyimpana sementara limbah B3	Persentase Limbah B3 yang disimpan sementara	Selayar	9,25	111.505.900			9,25	114.296.893
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kec. Benteng	5 Dokumen	61.505.900	DAU		5 Dokumen	62.000.000
2	11	05	2.01	02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kec. Benteng	1 Laporan	50.000.000	DAU		1 Laporan	52.296.893
2	11	05	2.02		Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan	Selayar	9,25%	10.000.000	DAU		9,25%	10.000.000
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan	Kec. Benteng	5 Dokumen	61.505.900	DAU		5 Dokumen	62.000.000

					Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
2	11	05	2.02	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kec. Benteng	1 Laporan	50.000.000	DAU		1 Laporan	52.296.893
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan		64,00	116.574.350			66,00	119.492.206
2	11	06	2.01		Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh	Rasio Pejabat Pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda	Selayar	3,33	116.574.350			16,67	119.492.206

					pemerintah daerah kabupaten/kota								
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Selayar	141 Dokumen	35.000.000	DAU		141 Dokumen	36.500.000
2	11	06	2.01	02	Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Selayar	15 Orang	26.574.350	DAU		25 Orang	26.992.206
2	11	06	2.01	03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Selayar	15 Laporan	30.000.000	DAU		15 Laporan	30.000.000

2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Selayar	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	26.000.000
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya		2,27	30.410.700			3,41	31.171.880
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional terkait PPLH yang diakui	Selayar	11,36	30.410.700			11,36	31.171.880
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan	Selayar	1 Dokumen	30.410.700	DAU		1 Dokumen	31.171.880

					kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH							
2	11	07	2.02		Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH yang dibina	Selayar	100%	10.000.000	DAU		100%	15.000.000
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kerifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan pendampingan	Selayar	1 buah	10.000.000,-	DAU		1 buah	15.000.000,-
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan diklat		23,08	60.821.400			23,08	62.343.760

2	11	08	2.01		Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Selayar	100	60.821.400			100	62.343.760
2	11	08	2.01	02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Selayar	1 Dokumen	60.821.400	DAU		1 Dokumen	62.343.760
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang Berprestasi		33,33	15.205.350			33,33	15.585.940
2	11	09	2.01		Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten	Selayar	15,00	15.205.350			15,00	15.585.940

2	11	09	2.01	01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Selayar	20 Entitas	15.205.350	DAU		20 Entitas	15.585.940
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan		100,00	35.479.150			100,00	36.367.193
2	11	10	2.01		Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	Persentase Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	Selayar	100	35.479.150			100	36.367.193
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Selayar	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.500.000

2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Selayar	1 Dokumen	20.479.150			1 Dokumen	20.867.193
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi		1,30	2.959.974.800			1,30	3.034.062.969
2	11	11	2.01		Pengelolaan sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	Selayar	14,23	2.959.974.800			14,27	3.034.062.969
2	11	11	2.01	01	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Benteng	1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000
2	11	11	2.01	02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaaur ulang dan pemanfaatan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang	Benteng, Bontoharu	3 Laporan	400.000.000	DAU		3 Laporan	397.000.000

					kembali	dan Pemanfaatan Kembali							
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kec. Benteng, Kec. Bontoharu	6000 Ton	396.000.000	DAU		6000 Ton	396.000.000
2	11	11	2.01	04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kec. Benteng	3 Kelompok	50.000.000	DAU		5 Kelompok	50.000.000
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah	Benteng	3 Dokumen	85.000.000	DAU		3 Dokumen	85.000.000

						Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada							
2	11	11	2.01	06	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Benteng	3 Dokumen	30.000.000	DAU		3 Dokumen	30.000.000
2	11	11	2.01	07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST SPA kab/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Masyarakat/Se layar	678 Unit	1.968.974.800	DAU/ DAK		69 Unit	2.046.062.969
									50.903.260.000				47.368.652.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program DLH Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas-aktivitas yang terukur bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan.

Program dimaksud hanya program lokalitas kewenangan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penataan kepegawaian dan pelayanan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Program ini dimaksudkan untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya terhadap keselamatan pekerja, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Kegiatan :

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kab/Kota;

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup kabupaten dengan mengendalikan kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kegiatan :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas ekosistem dalam keanekaragaman hayati masing-masing species yang dapat membantu keberlanjutan alam.

Kegiatan :

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).

Kegiatan :

- a. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

Program ini dimaksudkan untuk menginventarisasi tradisi atau pengetahuan local tentang hal-hal tabu (rahasia) dan sakral dalam pelestarian fungsi atau pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Kegiatan :

- a. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola usaha di bidang lingkungan hidup.

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Program ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat dan perorangan atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup dan/atau telah berhasil mengembangkan usaha bidang lingkungan hidup.

Kegiatan :

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Program ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi awal, menilai sifat pengaduan dan/atau masalah serta menindaklanjuti setiap keluhan atau konflik lingkungan hidup.

Kegiatan :

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

11. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dimaksudkan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

Dari berbagai program yang direncanakan Tahun 2023, terdapat 10 program yang termasuk urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan non dasar dan 1 program yang terfokus pada penunjang urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pendanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 membutuhkan dana/pagu indikatif sebanyak Rp.15.406.431.000,- (lima belas milyar empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

BAB V

PENUTUP

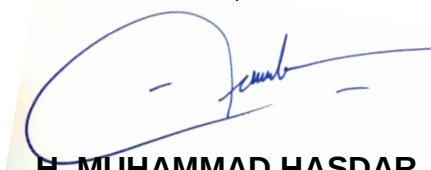
Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup;
3. Penambahan kuantitas aparatur lingkungan hidup melalui pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional serta pengangkatan pegawai baru;
4. Penataan dan penyempurnaan pedoman teknis penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya berkenaan dengan kegiatan yang mempunyai dampak secara langsung kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Semoga Renja ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2023.

Benteng, 20 Maret 2022

KEPALA DLH,



H. MUHAMMAD HASDAR, SKM, M.Kes.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19620906 198302 1 007